

EFEKTIVITAS PELAYANAN SURAT REKOMENDASI CPMI (CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA) DALAM UPAYA TERTIB ADMINISTRASI DI KABUPATEN INDRAMAYU

I MADE FARRAS AJI HOGANTARA

NPP. 30.0548

Asdaf Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat
Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: farrasaji@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Piet Hein Pusung, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The Recommendation Letter for Indonesian Migrant Workers (CPMI) is a document issued by relevant agencies in Indonesia to facilitate the placement process of Indonesian migrant workers abroad. The background for the existence of the CPMI recommendation letter arises from the need to protect the rights of migrant workers and ensure they receive adequate protection in the workplace in the destination country. Each year, Indonesia receives a significant amount of foreign exchange from migrant workers, both male and female (known as TKI and TKW), with remittances amounting to hundreds of millions of dollars sent from abroad. Therefore, as citizens, TKI and TKW have the right to security and protection from the country, as well as assistance and support from Indonesian representatives abroad, and repatriation to Indonesia if necessary. Hence, the Labor Office has the responsibility to provide good services to prospective TKI and TKW, particularly regarding the CPMI recommendation letter. However, considering the large number of aspiring migrant workers, it is essential to assess whether the services provided by the Labor Office have been of good quality, as public services have broad implications for the economic and political aspects of life. The services in question are related to TKI and TKW, many of whom come from Indramayu Regency.*

Purpose: *The provision of services for the CPMI recommendation letter (Indonesian Migrant Worker Candidates) focuses on administrative order goals in Indramayu Regency. The objective of this study is to examine and explain the effectiveness of the CPMI recommendation letter service in efforts to maintain administrative order at the Indramayu Regency Labor Office.*

Method: *This research uses a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, while data analysis techniques involve data reduction, data presentation, and drawing conclusions.*

Result: *The research findings indicate that the service for the Recommendation Letter for Indonesian Migrant Workers has met the target objectives, thus achieving the desired outcomes. However, there are still several obstacles, one of which is the presence of Indonesian Migrant Workers who work illegally abroad. This means that these migrant workers do not follow the official procedures set by the local government.*

Conclusion: *The CPMI recommendation letter service has had an impact and brought about changes in society by altering the mindset of individuals to no longer submit CPMI recommendations without following the proper procedures. However, one obstacle that arises is the existence of Indonesian migrant workers who work illegally abroad, necessitating various efforts by the Indramayu Regency Labor Office to address this issue, including collaborating with the Indonesian National Police's Criminal Investigation Agency (Bareskrim POLRI).*

Keywords: *Administrative Order, Effectiveness, CPMI Recommendation Letter Service.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Surat rekomendasi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh instansi terkait di Indonesia untuk memfasilitasi proses penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Latar belakang dari keberadaan surat rekomendasi CPMI ini timbul karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak pekerja migran dan memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang memadai di tempat kerja di negara tujuan. Setiap tahunnya negara Indonesia mendapatkan devisa yang sangat besar dari pekerja migran baik TKI maupun TKW, remiten sebesar ratusan juta dolar mereka kirimkan dari luar negeri. Maka, sebagai warga negara, TKI dan TKW berhak mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari negara, serta dibantu dan dihimpun oleh perwakilan Indonesia di luar negeri dan dipulangkan ke Indonesia jika diperlukan. Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik kepada calon TKI dan TKW, khususnya terkait surat rekomendasi CPMI. Namun, dari banyaknya peminat pekerja migran, apakah pelayanan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja sudah memberikan kualitas pelayanan dengan baik atau tidak, mengingat pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan ekonomi dan politik. Pelayanan yang dimaksud berhubungan terhadap TKI dan TKW yang banyak berasal dari Kabupaten Indramayu. **Tujuan:** Pemberian Pelayanan Surat Rekomendasi CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) berfokus pada tujuan penertiban administrasi di Kabupaten Indramayu. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana Efektivitas Pelayanan Surat Rekomendasi CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) Dalam Upaya Tertib Administrasi Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan Surat Rekomendasi Calon Pekerja Migran Indonesia telah memenuhi target sasaran sehingga capaian tujuan dapat dikatakan terpenuhi. Namun masih ada beberapa hambatan salah satunya yaitu adanya Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri secara illegal. Artinya Pekerja Migran tersebut tidak melalui prosedur yang resmi yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. **Kesimpulan:** Pelayanan Surat CPMI ini memberikan dampak dan perubahan terhadap masyarakat dengan merubah pola pikir untuk tidak lagi melakukan pengajuan rekomendasi CPMI dengan tidak sesuai prosedur. Adapun hambatan yang terjadi berupa adanya pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri secara illegal sehingga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu harus melakukan berbagai upaya dalam menangani hambatan tersebut diantaranya dengan menjalin kerjasama dengan Bareskrim POLRI.

Kata Kunci: Tertib Administrasi, Efektivitas, Pelayanan Surat Rekomendasi CPMI

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang melakukan migrasi internasional yang cukup besar. Buruh migran Indonesia di negara-negara maju telah memberikan manfaat bagi sektor kerja formal dan akumulasi jasa mereka berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi negara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, masalah migrasi internasional sering kali dikaitkan dengan kegiatan perekonomian suatu negara. Penanganan sumber daya manusia merupakan masalah nasional yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Jika penyediaan fasilitas tersebut lemah, hal tersebut dapat menyebabkan tekanan sosial dan mempengaruhi aspek politik dan keamanan masyarakat. Salah satu wilayah di Indonesia yang banyak mengirim tenaga kerja ke luar negeri adalah Daerah Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Data BP2MI dari tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Indramayu mengirimkan 4.704 buruh migran, yang menempati peringkat pertama di Indonesia. Migrasi tenaga kerja ke luar negeri merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi perdagangan manusia (human trafficking) dan kasus perdagangan sering terjadi dalam konteks migrasi tenaga kerja. Oleh karena itu, jumlah besar pekerja migran Indonesia yang melakukan migrasi kerja harus dipertimbangkan oleh pemerintah dalam mengembangkan kebijakan yang efektif untuk menyediakan mekanisme penempatan yang sesuai dengan standar HAM. Sebagai penyedia layanan publik, pemerintah seharusnya dapat menyediakan layanan yang baik untuk mensejahterakan masyarakat.

Indramayu, yang dikenal sebagai "Kota Mangga," memiliki dua karakteristik yang khas. Di satu sisi, Indramayu terkenal sebagai sumber tenaga kerja yang cukup banyak untuk pekerjaan di luar negeri, sehingga menciptakan stereotip tersendiri tentang TKI. Di sisi lain, jumlah pengangguran di Indramayu cukup besar, dan lapangan kerja terbatas, sehingga masyarakat Indramayu memutuskan untuk mencari nasib di luar negeri sebagai jawaban atas masalah ekonomi yang mereka hadapi. Ketersediaan lapangan kerja dan upah yang tinggi di luar negeri menarik minat TKI, terutama perempuan asal Indramayu, untuk bekerja di luar negeri. Menurut data dari Migrant Care, jumlah TKI perempuan meningkat di luar negeri. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa banyak TKI mencari pekerjaan di luar negeri karena tidak ada lapangan kerja yang memadai di dalam negeri dan upah yang lebih tinggi ditawarkan di luar negeri. (Sarwono dan Mainarno, 2009).

Sebuah penelitian yang dilakukan di Indramayu, Jawa Barat menunjukkan bahwa migrasi internasional merupakan strategi bertahan hidup di desa yang sedang mengalami krisis (Romdiati, 1998 dalam Wulan, 2010). Penelitian migrasi lain juga menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama migrasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Lee (1996), Todaro (1979), dan Titus (1982) dalam Mantra (2015), motif utama seseorang untuk melakukan migrasi adalah alasan ekonomi, terutama karena ketimpangan ekonomi antar daerah. Wilayah yang kurang berkembang ekonominya seringkali memiliki keterbatasan terhadap akses ekonomi, sehingga mendorong warganya untuk mencari kesempatan ekonomi di luar wilayah tersebut. Banyak alasan yang mendorong sejumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri, salah satunya adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkannya, terutama jika dibandingkan dengan tetangga, sahabat, atau kerabat yang sudah lebih sejahtera karena bekerja sebagai TKI di luar negeri. Bekerja di luar negeri diharapkan dapat memberikan kehidupan yang lebih sejahtera dan stabil secara ekonomi. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam mencari pekerjaan di dalam negeri, yang menjadi alasan utama calon TKI meninggalkan kampung halaman mereka. (Nasution. 1957:78).

Secara umum, menjadi TKI di luar negeri dianggap sebagai kesempatan dan pengalaman yang penting bagi banyak orang, terutama wanita. Banyak dari mereka memutuskan untuk menjadi TKI karena ingin meningkatkan kondisi ekonomi keluarga mereka. Indramayu dikenal sebagai daerah yang banyak menyuplai TKI ke luar negeri, bahkan lebih banyak dari daerah lain. Di Indonesia, TKI

dan TKW adalah sumber penghasil devisa terbesar bagi negara, yang setiap tahun mengirimkan ratusan juta dolar dari luar negeri. Meski begitu, pelayanan publik di Indonesia masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan dan diselesaikan secara komprehensif. Dalam hal ini, Dinas Tenaga Kerja Indramayu memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik kepada calon TKI dan TKW, khususnya terkait surat rekomendasi CPMI. Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Indramayu sangat penting, karena berdampak pada kehidupan ekonomi dan politik masyarakat, terutama bagi mereka yang banyak berasal dari Indramayu. Sebagai warga negara, TKI berhak mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari negara, serta dibantu dan dihimpun oleh perwakilan Indonesia di luar negeri dan dipulangkan ke Indonesia jika diperlukan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan mengenai permasalahan administrasi dalam pelayanan surat rekomendasi para calon pekerja migran Indonesia atau CPMI. Menjadi Tenaga Kerja Indonesia atau TKIN dianggap sebagai kesempatan dan pengalaman yang penting bagi banyak orang. Kabupaten Indramayu dikenal sebagai daerah yang banyak menyuplai TKI ke luar negeri bahkan lebih banyak dari daerah lain. Dara BPPMI dari tahun 2018 sampai dengan 2020 menunjukkan bahwa Pekerja Migran atau OMIMaka dari itu, Pelayanan publik di Indonesia menjadi permasalahan yang harusnya diperhatikan dan diselesaikan secara komprehensif. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik kepada calon TKI maupun TKW, khususnya terkait surat rekomendasi CPMI. Dalam menjalankan program ini, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu tentunya mengalami beberapa masalah seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi sehingga menimbulkan adanya Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri secara illegal. Hal ini tidak lain dikarenakan masih adanya paradigma lama terkait dengan pelayanan yang diberikan pemerintah dimana melakukan pengajuan dokumen dianggap susah dan memerlukan biaya dalam pembuatannya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Edy Siswanto, berjudul *Kajian Efektivitas Layanan Kartu Tanda Pencari Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur* (Edy Siswanto, 2020), menemukan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Disnakertrans secara keseluruhan tidak memuaskan pelanggan dan perlu ditingkatkan. Untuk memastikan kinerja pelayanan kartu tanda pencari kerja (AK/1) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur optimal, kinerja petugas pelayanan harus ditingkatkan agar standar pelayanan dapat terpenuhi. Lalu penelitian Rizki Amalia yang berjudul *Kajian Efektivitas Dinas Ketenagakerjaan dalam mengurangi angka pengangguran melalui Job Fair (Bursa Kerja) di Kota Makassar* (Rizki Amalia, 2017) menunjukkan bahwa Job Fair yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tidak berhasil mengurangi angka pengangguran di kota tersebut. Meskipun dimensi pencapaian tujuan dari indikator kurun waktu telah terlaksana dengan baik dan tepat waktu, namun dari indikator sasaran/target belum dapat memenuhi target. Selain itu, dimensi integrasi dari indikator prosedur sudah berjalan dengan cukup baik, namun dari indikator proses sosialisasi dinilai masih kurang. Adapun indikator sumber daya/tenaga pelaksana secara garis besar berjalan cukup baik. Dalam hal dimensi adaptasi, indikator sarana dan prasarana dalam kegiatan Job Fair (Bursa Kerja) dianggap sudah cukup baik dan memadai, namun dari indikator peningkatan kemampuan belum dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian penelitian Anis Marsella yang berjudul *Kajian Efektivitas Program Tenaga Kerja Mandiri Dalam Mengatasi Pengangguran Di Dinas Tenaga Kerja Simalungun* (Anis Marsella, 2019) menyimpulkan bahwa meskipun tujuan pelaksanaan program telah tercapai, yaitu mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten

Simalungun, namun pelaksanaannya menghadapi banyak hambatan. Selain itu, pembagian sarana dan prasarana program belum merata dan tepat waktu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Tenaga Kerja Mandiri oleh Dinas Tenaga Kerja belum sepenuhnya sesuai dengan petunjuk yang diberikan, walaupun pihak yang terkait sudah melakukan tugasnya dalam hal berpartisipasi dan penyaluran dana. Penelitian oleh Zulkifli Alfi berjudul *Kajian Efektivitas Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Upaya Mengurangi Masalah Pengangguran Terdidik Di Wilayah Kota Pekanbaru* (Zulkifli Alfi, 2022) menyimpulkan bahwa Disnaker Kota Pekanbaru memiliki peran penting dalam membantu pencari kerja dengan perusahaan pengguna tenaga kerja, tetapi berbagai faktor eksternal seperti pandemi membuat angka pengangguran meningkat secara drastis sehingga Disnaker kesulitan dalam mengendalikan masalah tersebut. Namun, Disnaker tidak memiliki strategi khusus dalam mengatasi pengangguran terdidik karena dianggap semua golongan pengangguran adalah tanggung jawab Disnaker tanpa perlakuan khusus. Untuk mengatasi masalah tersebut, Disnaker Kota Pekanbaru membuat dan melaksanakan dua program ketenagakerjaan, yaitu "Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja" dan "Program Peningkatan Kesempatan Kerja" yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi para pencari kerja. Dan Penelitian Nurfitriana yang berjudul *Efektivitas Pelayanan Kardi Tanda Pencari Kerja (AK 1) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar* (Nurfitriana 2017) menyimpulkan bahwa meskipun ada beberapa indikator yang belum sesuai dan tidak mendukung keefektifan pendekatan proses, seperti kurangnya efisiensi dalam pelayanan yang belum terlaksana dengan baik, serta masyarakat yang tidak setuju dengan desentralisasi dalam pengambilan keputusan, namun masih ada usaha yang dilakukan oleh individu maupun organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang sangat penting. Oleh karena itu, perlu pemikiran selanjutnya tentang dampak positif dari membangun kerjasama yang baik. Dari segi hubungan antara pimpinan dan bawahan, semangat kerjasama sudah berjalan dengan efektif antara kedua belah pihak. Meskipun demikian, karena masih ada beberapa indikator yang belum mendukung, maka pelayanan belum terlaksana secara efektif.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan berfokus pada program pelayanan surat Rekomendasi Calon Pekerja Migran Indonesia atau CPMI yang seharusnya memiliki dampak bagi tertib Administrasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan adalah kualitatif, namun untuk indikator yang digunakan yaitu ukuran efektivitas menurut Duncan (Duncan, 2010) dan Richard M. Steers (Richard, 1985) dimana efektivitas dapat dilihat dari Pencapaian Tujuan, Integrasi serta Adaptasi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan Efektivitas Pelayanan Surat Rekomendasi CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia), untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan faktor penghambat pelayanan surat rekomendasi CPMI serta mendeskripsikan upaya apa saja yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dalam mengatasi hambatan yang ada.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif menurut Creswell yang sudah diterjemahkan, penelitian metode kualitatif adalah dengan mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis datanya, dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda-beda. Kemudian Creswell menyebutkan ciri umum dalam penelitian kualitatif sebagai berikut :

1. Lingkungan;
2. Peneliti sebagai instrument penting;
3. Beragam metode;
4. Pemikiran yang kompleks melalui logika induktif dan deduktif;

Penulis mengumpulkan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Kepala Bidang Pelatihan Kerja, dan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja serta 5 orang masyarakat, Adapun analisisnya menggunakan teori ukuran efektivitas yang digagas oleh Duncan (Duncan, 1980) yang menyatakan bahwa untuk mengukur tingkat efektivitas dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu pencapaian tujuan, integrase, dan juga adaptasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Pelayanan Surat Rekomendasi CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) Dalam Upaya Tertib Administrasi Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu

3.1.1 Pencapaian Program

Program Pelayanan Surat Rekomendasi CPMI sebagai syarat bagi para Calon Pekerja Migran Indonesia untuk mendapatkan paspor ke luar negeri. saat ini pelayanan surat rekomendasi CPMI di kabupaten Indramayu telah terintegrasi pada Sistem Informasi ketenagakerjaan dan Pembuatan Rekomendasi Paspor. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat secara mandiri untuk mengajukan surat rekomendasi sehingga proses penghimpunan administrasi akan lebih efektif serta efisien. Proses penyelesaian surat rekomendasi CPMI dapat diselesaikan dalam kurun waktu 3 (tiga) hari kerja.

Program pelayanan surat rekomendasi CPMI ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang mengharuskan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk mengikuti syarat-syarat pendaftaran sehingga tertib administrasi dapat terwujud. Dengan adanya aturan yang mengatur tentang administrasi dan perlindungan tenaga kerja ini, maka tenaga kerja akan lebih di jamin kesejahteraan dalam perlindungan tenaga kerja. Capaian Program pelayanan surat rekomendasi CPMI juga dapat digambarkan dari rekapitulasi pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia oleh tabel berikut :

Tabel 4.1 Rekapitulasi Pendaftaran Rekomendasi CPMI Tahun 2022 Per Kecamatan Kabupaten Indramayu

No.	Kecamatan	L	P	Jumlah
1	Widasari	86	293	379
2	Pasekan	136	399	535
3	Gantar	71	268	339
4	Sindang	75	312	387
5	Haurgeulis	122	263	385
6	Cikedung	154	488	642
7	Balongan	82	326	408
8	Bangodua	85	364	449
9	Kroya	68	230	298
10	Gabuswetan	9	331	429

11	Arahan	108	427	535
12	Karangampel	153	384	537
13	Kedokanbunder	133	313	446
14	Terisi	164	530	694
15	Cantigi	273	434	707
16	Sukra	148	397	545
17	Sukagumiwang	186	403	589
18	Losarang	173	452	625
19	Bongas	345	768	1.113
20	Jatibarang	130	427	557
21	Patrol	174	463	637
22	Lelea	112	328	440
23	Indramayu	91	290	381
24	Kadanghaur	159	375	534
25	Lohbener	131	335	466
26	Anjatan	187	404	591
27	Krangkeng	118	465	583
28	Tukdana	141	338	479
29	Kertasemaya	137	401	538
30	Sliyeg	177	460	637
31	Juntinyuat	360	759	1.119
JUMLAH		4.577	12.427	17.004

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, 2022

Dari tabel diatas dapat diperhatikan bahwa terdapat total 17.004 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) per tahun 2022 yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu. Jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah pendaftar Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) pada tahun 2022 sebanyak 17.004 orang dengan pendaftar terbanyak dari kecamatan Juntinyuat yakni sebanyak 1.119 dan kecamatan Bongas yakni sebanyak 1.113. Terdapat beberapa negara yang menjadi tujuan dari Calon Pekerja Migran Indonesia ini yang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.2 Rekapitulasi Negara Tujuan CPMI Tahun 2022

No.	Negara Tujuan	Jumlah CPMI
1	Taiwan	10.277
2	Hongkong	3.067
3	Singapura	1.316
4	Korea Selatan	719
5	Malaysia	823
6	Polandia	288
7	United Kingdom	84
8	Saudi Arabia	357
9	Brunai Darussalam	38
10	Papua New Guinea	9
11	Bahrain	26

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, 2022

Dapat diperhatikan pada tabel diatas bahwa negara yang menjadi tujuan terbanyak oleh Calon Pekerja Migran Indonesia adalah Taiwan, namun beberapa orang juga memilih untuk bekerja di negara tetangga yaitu di Papua New Guinea (Papua Nugini).

3.1.2 Integrasi

Integrasi dalam program dapat dilihat dari kemampuan program untuk menyelaraskan sikap dan perilaku para pemangku kepentingan. Program tersebut menjadi wadah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan menjadi pusat kerjasama bagi berbagai pihak yang peduli dengan pemberdayaan masyarakat serta penataan lingkungan dan infrastruktur. Dalam proses Sosialisasi tentang program pelayanan surat rekomendasi CPMI, Masyarakat diberikan pemahaman mengenai bagaimana alur serta persyaratan untuk pengajuan rekomendasi sebagai Pekerja Migran Indonesia.

3.1.3 Adaptasi

Kemampuan adaptasi program dapat diketahui dari kemampuan program beradaptasi dengan situasi dan kondisi dari masyarakat serta kemampuan program memberikan dampak dan perubahan kepada masyarakat. Indikator Adaptasi ini dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu dari segi peningkatan kemampuan, kemudian dari ketersediaan sarana dan prasarana.

Pertama dalam hal peningkatan kemampuan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu berfokus kepada amanat yang diberikan oleh Bupati Indramayu untuk menekan angka Pekerja Migran Indonesia yang tidak melalui prosedur legal. Menurut beliau, Pekerja Migran Indonesia yang tidak mengikuti prosedur secara legal (non-prosedural) hanya akan membawa resiko dan dampak buruk terhadap diri sendiri dan juga terhadap negara Indonesia. Maka dari itu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan juga sosialisasi kepada masyarakat agar nantinya masyarakat semakin ter-edukasi bahwa dengan mengikuti procedural yang legal, Pekerja Migran Indonesia mendapatkan jaminan serta perlindungan dari negara.

3.2. Faktor Penghambat yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu Dalam Pelaksanaan Pelayanan Surat Rekomendasi CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia)

Dalam menjalankan program Pelayanan Surat Rekomendasi CPMI, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu tentunya mengalami hambatan, yang paling utama adalah masih adanya Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri secara illegal. Artinya Pekerja Migran tersebut tidak melalui prosedur yang resmi yang telah dibuat oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Akibatnya, akan timbul berbagai resiko yang akan berdampak pada keselamatan Pekerja Migran Indonesia Sendiri.

Faktor yang kedua adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi dimana masih banyak masyarakat yang melewati ini secara illegal. Hal ini terjadi dikarenakan pemikiran dari masyarakat dimana melakukan pengajuan dokumen dianggap susah dan memerlukan biaya dalam pembuatannya. Faktor ini menyebabkan dinas tenaga kerja mengalami kesulitan untuk mengajak masyarakat dalam berpartisipasi dalam pelayanan surat rekomendasi CPMI ini.

Upaya dalam pengembangan dan optimalisasi sistem informasi ketenagakerjaan dan juga layanan bantuan dari media sosial Dinas Tenaga Kerja juga perlu dilakukan untuk membantu mengatasi sedikit keluhan yang diutarakan oleh beberapa masyarakat mengenai tingkat kecepatan responsibilitas dari layanan bantuan tersebut.

3.3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dalam mengatasi hambatan yang ada

Hambatan yang terjadi tentunya ada penyelesaiannya, begitupun dengan faktor penghambat program pelayanan surat rekomendasi CPMI dalam upaya tertib administrasi. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu diantaranya sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu telah melakukan pengenalan terkait implementasi layanan program CPMI, yang telah dilakukan melalui penyuluhan secara langsung dan media sosial. Media sosial digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dan menginformasikan pesan dan berita kepada masyarakat, terutama mereka yang berada di lokasi yang jauh dari kantor.

2. Pencegahan untuk Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak melalui prosedur yang legal

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dalam rangka pencegahan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur yang legal telah bekerjasama dengan Bareskrim POLRI. Integrasi rekomendasi paspor sebagai tindak lanjut Perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham yang memungkinkan tersaringnya setiap Pekerja Migran Indonesia yang berangkat dan melewati pemeriksaan imigrasi. Kerjasama perlindungan dengan otoritas perbatasan dan penjagaan yang ketat akan mengurangi penempatan Pekerja Migran Indonesia non-prosedural.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Di Indonesia, TKI dan TKW adalah sumber penghasil devisa terbesar bagi negara, yang setiap tahun mengirimkan ratusan juta dolar dari luar negeri. Meski begitu, pelayanan publik di Indonesia masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan dan diselesaikan secara komprehensif. Dalam hal ini, Dinas Tenaga Kerja Indramayu memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik kepada calon TKI dan TKW, khususnya terkait surat rekomendasi CPMI. Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Indramayu sangat penting, karena berdampak pada kehidupan ekonomi dan politik masyarakat, terutama bagi mereka yang banyak berasal dari Indramayu. Sebagai warga negara, TKI berhak mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari negara, serta dibantu dan dihimpun oleh perwakilan Indonesia di luar negeri dan dipulangkan ke Indonesia jika diperlukan. Namun, di sisi lain peneliti menemukan bahwa dalam menjalankan program Pelayanan Surat Rekomendasi CPMI, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu tentunya mengalami hambatan, yang paling utama adalah masih adanya Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri secara ilegal. Artinya Pekerja Migran tersebut tidak melalui prosedur yang resmi yang telah dibuat oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Akibatnya, akan timbul berbagai resiko yang akan berdampak pada keselamatan Pekerja Migran Indonesia Sendiri.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat tertibnya tertib administrasi dalam pelayanan surat rekomendasi CPMI di Kabupaten Indramayu ini yaitu masih ada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya mengikuti prosedur dalam pelayanan surat yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja sehingga masih ada Pekerja Migran yang bekerja di luar negeri secara ilegal.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Pelayanan Surat Rekomendasi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dapat dikatakan berjalan efektif. Calon Pekerja Migran juga memberikan dampak dan perubahan terhadap masyarakat, hal ini dapat dilihat dari bagaimana masyarakat merubah pola pikir untuk tidak lagi melakukan pengajuan rekomendasi CPMI tidak sesuai dengan prosedur. Selanjutnya pelayanan rekomendasi CPMI ini telah diintegrasikan dengan Sistem Informasi ketenagakerjaan sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Layanan bantuan juga telah disediakan agar masyarakat dapat segera mendapatkan jawaban atas kendala yang sedang dialami. Hambatan yang terjadi berupa masih adanya Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri secara ilegal. Artinya Pekerja Migran tersebut tidak melalui prosedur yang

resmi yang telah dibuat oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu telah melakukan berbagai upaya demi menangani hambatan dalam meningkatkan tertib administrasi pada pelayanan surat rekomendasi CPMI. Salah satu upaya dalam mencegah Calon Pekerja Migran Indonesia untuk melakukan pengajuan tidak sesuai dengan prosedur, maka Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan Bareskrim POLRI. Integrasi rekomendasi paspor sebagai tindak lanjut Perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham yang memungkinkan tersaringnya setiap Pekerja Migran Indonesia yang berangkat dan melewati pemeriksaan imigrasi. Kerjasama perlindungan dengan otoritas perbatasan dan penjagaan yang ketat akan mengurangi penempatan Pekerja Migran Indonesia non-prosedural.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelayanan surat rekomendasi CPMI dalam upaya tertib administrasi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajagrafindo
- Amirin, M. Tatang. 2000. Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek). Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. 1998. Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Five Traditions. California: Sage.
- Denzin dan Lincoln. 1994. Hand Book of Qualitative Research, Sage Publication. Thousan Oaks, London
- Gay, L, R. 2009. Educational Research: Competencies for Analysis and Application-9th. Ed. New Jersey: Merril Pearson Education.
- Handoko, Hani, 1993, Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi, cetakan ketujuh, Yogyakarta : BPFE.
- Kotler Philip. 2008. Manajemen Pemasaran, Edisi Millenium diterjemahkan oleh Benyamin Molan: PT Prenhallindo. Jakarta.
- Mahmoedin. (2010). Kualitas Pelayanan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mantra, Ida Bagoes. 1994. Pengantar Studi Demografi. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman dan J Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Ed.3. USA: Sage.

Moenir, H.AS. 2008. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.

Moleong, Lexi J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.

Nazir, Moh. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Penerbit Salemba Humanika *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, Jakarta : PT Rineka Cipta.

B. Jurnal

Lee, Everest S. 1966. A Theory of Migration. *Demography*, Volume 3 Nomor 1. <http://www.jstor.org>

Todaro, M. P. 1979. A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries. *American Economic Review*

Titus, Milan J. 1982. *Migrasi Antar Wilayah di Indonesia (Seri Terjemahan No.12)*. Yogyakarta : Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM

Rachmawati. 2007. Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *E-Journal Ivet*, 11

Rizki, Amalia. 2017. Efektivitas Dinas Ketenagakerjaan Dalam Mengurangi Angka Pengangguran Melalui Job Fair (Bursa Kerja) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 5 (2).

Mosal, Maurin M. (2013). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado. *Jurnal EMBA Vol. 1*.

Japami, Wingfi (2019) Efektivitas Pelayanan Keliling Online Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. Skripsi thesis, Fakultas Ilmu Sosial.

C. Peraaturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

D. Website

Republika.co.id. 2020. <https://m.republika.co.id> diakses tanggal 23 Januari 2023